



## KERANGKAACUAN KEGIATAN *Knowledge Management Forum 2023*

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)  
dengan dukungan proyek-proyek kerjasama pembangunan yang diimplementasikan oleh:  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

### **“Penguatan Aspek Tata Kelola untuk Mendukung Pembiayaan yang Berkelanjutan Menuju Perkotaan Rendah Karbon dan Tangguh Iklim”** **KOTA JAKARTA, 17-18 Oktober 2023**

## Pendahuluan

Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim merupakan salah satu strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menyoroti implementasi kebijakan rendah karbon di tingkat kota, seperti pada target 11.6 “Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota”, serta target 13 “Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya”.

Upaya akselerasi pengembangan kebijakan rendah karbon dan berketahanan iklim diperlukan dengan mempertimbangan keberlanjutan aksi-aksi yang telah direncanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Percepatan ini bisa diupayakan antara lain dengan memberikan perhatian yang lebih mendalam pada pengembangan aspek Fisik dan Tata kelola secara berkesinambungan dan seimbang. Pengembangan infrastruktur sebaiknya diimbangi dengan perbaikan tata kelola, antara lain pengaturan kelembagaan dan regulasi, kapasitas dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta didukung dengan pembiayaan dan pendanaan yang berkelanjutan. Penyusunan kebijakan yang tepat tentunya menjadi kunci, yaitu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kota. Penguatan ini dibutuhkan khususnya pada isu-isu prioritas perkotaan, antara lain pada sektor pengelolaan sampah dan mobilitas/transportasi perkotaan.

Pemerintah Jerman mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim, melalui sejumlah proyek kerjasama yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, antara lain: *Emissions Reduction in Cities through Improved Waste Management* (ERiC DKTi); *Urban Act*; *C40 Financing Facility* (CFF); *Implementation of the Sustainable Urban Transport Programme Indonesia* (SUTRI NAMA); dan *Reduce, Reuse, Recycle to Protect Marine Environment and Coral Reefs* (3RproMar). Rangkaian kegiatan kerjasama ini tidak hanya menyoroti pengembangan kebijakan di tingkat pusat, namun juga memperkuat kapasitas di tingkat daerah.

*Knowledge Management Forum* (KMF) pertama kali diadakan di Jakarta pada tahun 2013, merupakan suatu forum yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi yang kondusif agar dapat menjadi tempat berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan praktik-praktik terbaik (*best-practice*); serta untuk membangun kepercayaan dan jejaring antar kota yang telah bekerja dalam membangun ketahanan iklim. KMF sendiri merupakan bagian dari aktivitas Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Asosiasi Pemerintah



Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan dimungkinkan untuk berinteraksi dengan kota di luar Pokja itu sendiri.

Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim APEKSI yang dibentuk pada bulan April 2012 di acara Lokakarya *Best Practice Transfer Program*-Kota Semarang, mempunyai peran utama sebagai garda depan untuk advokasi kebijakan dan kegiatan mengenai perubahan iklim ke Pemerintah. Melalui Pokja ini, diharapkan juga dapat terjalin jejaring antara pemerintah kota dan juga dengan sektor swasta, dimulainya inisiasi peningkatan kesadaran isu perubahan iklim untuk kota, serta dapat memberi masukan terhadap mekanisme kerja sama untuk aksi mitigasi, serta ketahanan dan adaptasi perubahan iklim. Keberagaman pengalaman seputar strategi pengembangan kota rendah karbon dan tahan iklim yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut pada KMF ini.

Untuk memberikan dampak yang lebih luas serta memfasilitasi penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah di tingkat pusat, KMF Tahun 2023 direncanakan berlangsung sebagai bagian dari acara pendahuluan (*pre-event*) Forum Perkotaan Nasional (*National Urban Forum/ NUF*) kedua. Sejalan dengan alternatif tema NUF kedua, KMF 2023 menyasar isu-isu strategis di perkotaan, khususnya untuk menitikberatkan pembahasan pada pengembangan aspek tata kelola untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan melalui KMF dapat memberikan masukan bagi diskusi di dalam NUF, mampu menjadi dukungan kekuatan dalam mencapai tujuan membangun kota-kota rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia serta menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat.

#### Dasar Hukum:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah)
- c. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
- f. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- g. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan

## Tujuan dan Keluaran

#### Tujuan dari pelaksanaan KMF 2023 ini antara lain:

- a. Berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan aspek tata kelola untuk mengupayakan keberlanjutan pembiayaan dalam mengembangkan kota yang rendah karbon dan tangguh iklim;
- b. Membangun jejaring yang lebih luas dan beragam dengan pemangku kepentingan terkait, baik antar institusi pemerintah, maupun dengan aktor non pemerintah, seperti kalangan dunia usaha, sektor informal, akademisi, media, komunitas lokal, dan praktisi;
- c. Mendiskusikan permasalahan dan alternatif solusi untuk mengupayakan perbaikan aspek tata kelola dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perubahan iklim di kota;



- d. Mengajak Pemerintah Kota untuk memikirkan prioritas aksi strategis untuk mendukung perbaikan tata kelola dalam kerangka kebijakan perubahan iklim di kota;
- e. Menyiapkan bahan rekomendasi sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat, untuk disampaikan pada dialog nasional selanjutnya. Dalam hal ini, rekomendasi dari KMF 2023 diharapkan dapat menjadi masukan bagi diskusi sektoral di dalam NUF Kedua.

**Keluaran yang diharapkan diperoleh dari KMF 2023 ini adalah sebagai berikut:**

- (1) Timbulnya kepedulian dan meningkatnya pemahaman terkait aspek tata kelola, khususnya untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan perubahan iklim di kota;
- (2) Terbangunnya jejaring kota rendah karbon dan berketahanan iklim yang lebih luas, dengan karakteristik yang beragam, baik antar kota Pokja Perubahan Iklim APEKSI, maupun dengan kota-kota percontohan proyek kerjasama yang diimplementasikan oleh GIZ, untuk mengupayakan keberlanjutan pertukaran pengetahuan dan pengalaman;
- (3) Terbukanya peluang kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk akselerasi pengembangan kebijakan perubahan iklim di kota;
- (4) Terbentuknya gagasan dan pemikiran bersama mengenai aksi strategis dan prioritas untuk mendukung perbaikan tata kelola dalam mengupayakan keberlanjutan pembiayaan dalam mengembangkan kebijakan perubahan iklim di kota.
- (5) Tersusunnya rekomendasi APEKSI tentang akselerasi kebijakan perubahan iklim di kota, khususnya untuk menitikberatkan pentingnya pengembangan aspek tata kelola untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan.

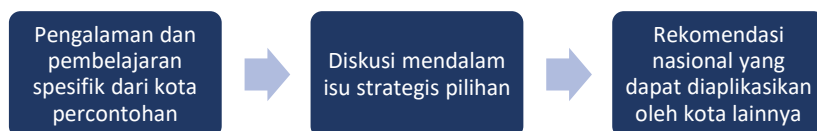
## Penyelenggara

APEKSI bekerja sama dengan GIZ Indonesia

## Format Kegiatan

### Hari 1: 17 Oktober 2023 - Workshop

Kegiatan KMF 2023 pada hari pertama akan diisi dengan *Fullday Workshop* yang diharapkan dapat menghadirkan pengalaman dan pembelajaran spesifik dari sejumlah kota percontohan yang kemudian akan didiskusikan secara lebih mendalam untuk merumuskan rekomendasi tingkat nasional yang dapat diaplikasikan secara umum kota-kota di Indonesia. Pengalaman spesifik dari setiap kota akan disajikan dalam bentuk diskusi panel dan galeri poster.



Adapun diskusi dalam hari pertama ini akan mengangkat sejumlah isu strategis perkotaan yang dikelompokkan dalam 4 (topik), yaitu (1) Kota Rendah Karbon dan Tangguh Iklim; (2) Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan; (3) Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi; (4) Ekonomi Sirkular untuk mendukung Pembiayaan yang Berkelanjutan.



Diskusi akan dilaksanakan dalam 3 rangkaian sesi, sebagai berikut:

### Sesi 1: Berbagi Cerita Antar Kota

Merupakan sesi pleno yang bertujuan memfasilitasi berbagi pengalaman dan pembelajaran antar kota, khususnya dengan menghadirkan pembicara dari perwakilan kota-kota yang mendapat pendampingan dari proyek kerjasama yang diimplementasikan oleh GIZ. Diskusi pleno akan menghadirkan narasumber perwakilan kota untuk berbagi praktik baik dan pembelajaran dari upaya perbaikan tata kelola di kota. Adapun pengalaman dari kota-kota lainnya akan disajikan dalam bentuk galeri poster yang akan ditampilkan di sepanjang acara.

### Sesi 2: Diskusi Terfokus Isu Strategis Kota

Dalam kelas paralel ini, akan dibicarakan secara lebih mendetail isu strategis untuk setiap topik. Peserta akan dibagi ke dalam 5 kelas untuk masing-masing topik. Diskusi dalam sesi ini khususnya untuk menyoroti tantangan, kesenjangan, dan potensi dari isu-isu strategis di setiap topik. Pengalaman dan pembelajaran spesifik yang dibagikan oleh pembicara di sesi 1 dapat didiskusikan untuk merumuskan formula rekomendasi kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh seluruh kota secara umum di Indonesia. Topik yang akan didiskusikan dalam sesi ini adalah sebagai berikut:

Kelompok	Isu	Topik Diskusi
1.	Kebijakan Rendah Karbon dan Tangguh Iklim	Penguatan dan/atau peningkatan integrasi vertikal terhadap sistem koordinasi dan kerja sama ( <i>cooperation and coordination system</i> ) yang efektif menuju pembangunan perkotaan rendah karbon dan tangguh iklim
2.	Pengelolaan Sampah	Bencana kebakaran TPA – Saatnya pemangku kepentingan bergotong royong dalam mengelola sampah. Bagaimana sinergi lintas pemangku kepentingan seharusnya berjalan?
3.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan transportasi publik sebagai prioritas kebijakan pemerintah kota melalui perencanaan kegiatan dan penganggaran</li> <li>- Praktik baik tata kelola, kelembagaan dan model bisnis dalam transportasi perkotaan</li> </ul>
4.	Ekonomi sirkular dan pembiayaan yang berkelanjutan	Kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengelolaan sampah di Indonesia



Sesi ini diharapkan diikuti oleh seluruh peserta dengan fasilitator dari proyek kerjasama, expert, atau praktisi. Diskusi dalam sesi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akan didiskusikan di Sesi 3.

### **Sesi 3: Dialog Kebijakan Perbaikan Tata Kelola**

Dalam sesi ketiga ini, hasil diskusi dari setiap topik akan dipresentasikan. Sesi ini diharapkan diikuti oleh seluruh peserta dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga yang terkait (Pemerintah Pusat). Sesi ini ditujukan untuk memfasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan, khususnya antara Pemerintah Daerah sebagai peserta KMF dengan perwakilan kementerian/lembaga di tingkat pusat. Diharapkan, rekomendasi yang telah disusun oleh peserta di setiap kelompok dapat memperoleh masukan dari perwakilan pemerintah pusat.

### **Hari 2: 18 Oktober 2023- Kunjungan Lapangan**

Dalam hari kedua KMF, akan dilaksanakan kunjungan lapangan yang bertujuan untuk menunjukkan contoh praktik baik pengelolaan aspek tata kelola dalam keberlanjutan pembiayaan dalam mendukung implementasi aksi perubahan iklim di kota. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memperoleh pengalaman untuk melihat secara langsung contoh penerapan tata kelola yang baik pada sektor publik. Pengalaman ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk membandingkan dengan kondisi aktual di kota masing-masing untuk mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, serta peluang yang dapat dijalankan untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Kunjungan lapangan direncanakan untuk melihat contoh praktik baik tata kelola di dua sektor, yaitu pengelolaan sampah dan transportasi. Kunjungan lapangan di sektor pengelolaan sampah ditujukan untuk menampilkan contoh penerapan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan opsi lokasi kunjungan adalah: TPS3R Ketapang Gambir, Jakarta. Dalam kegiatan kunjungan lapangan ini, peserta akan memperoleh penjelasan mengenai potensi pemanfaatan kembali sampah untuk meningkatkan rantai nilai sampah. Selain pengolahan sampah, peserta juga dapat mempelajari mekanisme kerjasama pemerintah dan komunitas dalam mengembangkan fasilitas pengolahan sampah, serta memperoleh gagasan terkait upaya edukasi untuk menjangkau kalangan yang lebih luas.

Adapun, pada sektor transportasi, kunjungan lapangan ditujukan untuk menampilkan praktik baik transformasi tata kelola transportasi, dengan opsi lokasi: *integrated transportation system* Trans Jakarta (opsi aktivitas: mengunjungi depo bus terintegrasi di Cawang atau menjajal rute transportasi terintegrasi- *to be confirmed*).

## **Waktu, Tempat, dan Susunan Acara**

Hari/tanggal : **17-18 Oktober 2023**

Waktu : 08.00 WIB- selesai

Lokasi : Hotel Aryaduta - Jakarta

Peserta :

- Anggota Pokja Perubahan Iklim APEKSI
- Perwakilan Dinas Perhubungan dari kota anggota Pokja Perubahan Iklim
- Perwakilan kota pilot proyek kerjasama yang diimplementasikan oleh GIZ





## AGENDA

Waktu	Agenda	Catatan
<b>16 Oktober 2023</b>		
15.00 – 20.00	Kedatangan peserta- <i>hotel check in</i>	GIZ dan APEKSI
<b>Hari 1: 17 Oktober 2023</b>		
09.00 - 09.20	Pembukaan	- APEKSI - GIZ
09.20 – 10.00	<i>warming up</i> dan perkenalan	Fasilitator Utama
10.00 – 12.00	<p><b>Sesi 1: Berbagi Cerita antar Kota</b> Solusi terintegrasi untuk memperkuat kebijakan kota rendah karbon dan tangguh iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Galeri poster:</b> poster setiap kota akan ditampilkan di ruangan workshop dan bisa dikunjungi oleh semua peserta sebelum/setelah workshop, atau saat rehat kopi.</li> <li>- <b>Diskusi pleno :</b> diawali dengan <i>elevator pitch</i> (presentasi 3 menit untuk 3 slide) dari setiap narasumber. Peserta dipersilahkan memberikan pertanyaan secara <i>live (online)</i>. Dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh fasilitator.</li> </ul> <p>Diskusi praktik baik, tantangan, dan peluang terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kota Padang Menuju Kota Rendah Karbon dan Tangguh Iklim</li> <li>Transportasi Berkelanjutan dan Pembiayaan Alternatif untuk Membangun Ketangguhan Kota Semarang</li> <li>Fleksibilitas Kelembagaan dalam Pendekatan Lokal Kota Jambi untuk Mempercepat Reformasi Pengelolaan Sampah</li> <li>Kemitraan Sektor Swasta untuk Mendukung Pengurangan Sampah di Kota Jakarta</li> </ol>	Seluruh peserta
12.00 – 12.15	Pembagian kelompok	Fasilitator Utama
12.15 – 13.15	<b>Istirahat, Sholat, dan Makan Siang</b>	
13.15 – 13.30	<i>Warming up</i>	Fasilitator Kelompok
13.30 – 15.00	<p><b>Sesi 2 : Diskusi Terfokus Isu Strategis Kota</b></p> <p>Mengidentifikasi gap, tantangan, dan potensi untuk isu strategis spesifik yang telah dipilih</p>	Seluruh peserta dipandu oleh fasilitator di setiap kelompok



Waktu	Agenda	Catatan
	oleh setiap kelompok topik.  Diskusi diharapkan dapat melihat lebih dalam dari sudut pandang perbaikan tata kelola untuk mengupayakan keberlanjutan pembiayaan	
15.00 – 15.30	Rehat kopi	
15.30 – 17.00	<b>Sesi 3: Dialog Kebijakan Perbaikan Tata Kelola</b> Mempresentasikan hasil diskusi setiap topik dan diskusi dengan perwakilan pemerintah pusat untuk memperoleh tanggapan terhadap isu dan rekomendasi yang telah didiskusikan pada sesi sebelumnya. <b>Narasumber:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK</li> <li>2. Direktorat Pengurangan Sampah, KLHK</li> <li>3. Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR</li> <li>4. Direktorat SUPD 1, Ditjen Bangda Kemendagri</li> <li>5. Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu</li> <li>6. Direktorat Angkutan Jalan, Kemenhub</li> </ol>	Fasilitator utama
17.00 – 17.30	Kesimpulan dan persiapan hari-2	Fasilitator utama
17.30 – 18.00	Istirahat	
18.00 – 20.30	Makan malam disediakan	
<b>Hari 2: 18 Oktober 2023</b>		
08.00 - 08.30	Persiapan keberangkatan	GIZ dan APEKSI
08.30 – 09.00	Refleksi singkat hari pertama dan konteks kunjungan lapangan	Seluruh peserta
09.00–09.45	Perjalanan ke lokasi kunjungan lapangan	
09.45 – 12.00	Kunjungan lapangan - TPS3R Ketapang Gambir - Transportasi terintegrasi PT Trans Jakarta	Seluruh peserta
12.00 – 12.30	Perjalanan ke lokasi makan siang	
12.30 – 14.30	<b>Makan siang, kesimpulan, dan penutupan</b>	
14.30 – 16.00	Perjalanan kembali ke hotel	
<b>19 Oktober 2023</b>		
09.00 – 12.00	Hotel Check out	